Ada Apa dengan Konflik Sudan?

Pizaro Gozali Idrus

Peneliti Center for Policy Research USM Malaysia

Dewan Pakar Yayasan KITA

Demografi Sudan

- Populasi sekitar 51–52 juta orang pada tahun 2025
- Sekitar 70 % dikategorikan etnis Arab Sudan, sisanya Beja, Fur, Nubia dll.
- Kehilangan 75% minyak usai berpisah dengan Sudan Selatan pada 2011
- Sudan adalah salah satu produsen emas terbesar di Afrika, dengan produksi emas yang terus meningkat selama dekade terakhir.
- Produksi emas Sudan diperkirakan mencapai 64 ton (Rp137 T) pada 2024, meningkat signifikan dari 41,8 ton pada 2022.

Situasi kemanusiaan di Sudan

- Hampir 25 juta orang menghadapi krisis pangan akut, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).
- Ada lebih dari 10,5 juta orang ter-internally displaced persons (IDP). Sedangkan jumlah pengungsi ke LN mencapai 5 juta orang.
- Menurut laporan United Nations Human Rights Office, antara 1 Januari dan 30 Juni 2025 sedikitnya 3.384 warga sipil tewas dalam konteks konflik.
- Menurut laporan lain, sejak pertengahan April 2023 hingga

Aktor Politik: Peta Pertarungan Sudan

- Forces of Freedom and Change (FFC)
- Sudan Armed Forces (SAF)
- Rapid Support Forces (RSF)

Bulan/Tahun	Peristiwa	Pemimpin / Pihak Terlibat	Catatan
April 2019	Jatuhnya Omar al-Bashir	Kekuatan sipil, militer, paramiliter	Bashir digulingkan setelah protes massal
April 2019	Dibentuk Dewan Militer Transisi (TMC)	Jenderal Abdel Fattah al-Burhan	Untuk mempertahankan kekuasaan militer
Agustus 2019	Perjanjian politik TMC – FFC	TMC & FFC	Membentuk Dewan Kedaulatan, masa transisi 39 bulan, rencana pemilu 2022
Agustus 2019	Abdalla Hamdok ditunjuk sebagai Perdana Menteri	Hamdok (FFC)	Memimpin pemerintahan sipil-militer transisi
Oktober 2021	Kudeta militer oleh SAF dan RSF	SAF & RSF	Menggulingkan pemerintah sipil, menahan PM Hamdok, membubarkan kabinet
November 2021	Abdalla Hamdok dibebaskan dan kembali menjadi PM	Hamdok	Posisi sipil tetap lemah, harus kompromi dengan militer
Januari 2022	Abdalla Hamdok mengundurkan diri	Hamdok	Ketidakmampuan membentuk pemerintahan sipil penuh
Januari 2022 – seterusnya	Sudan sepenuhnya dipimpin oleh militer	Jenderal Abdel Fattah al-Burhan & Dewan	Aspirasi demokrasi sipil terhenti, proses

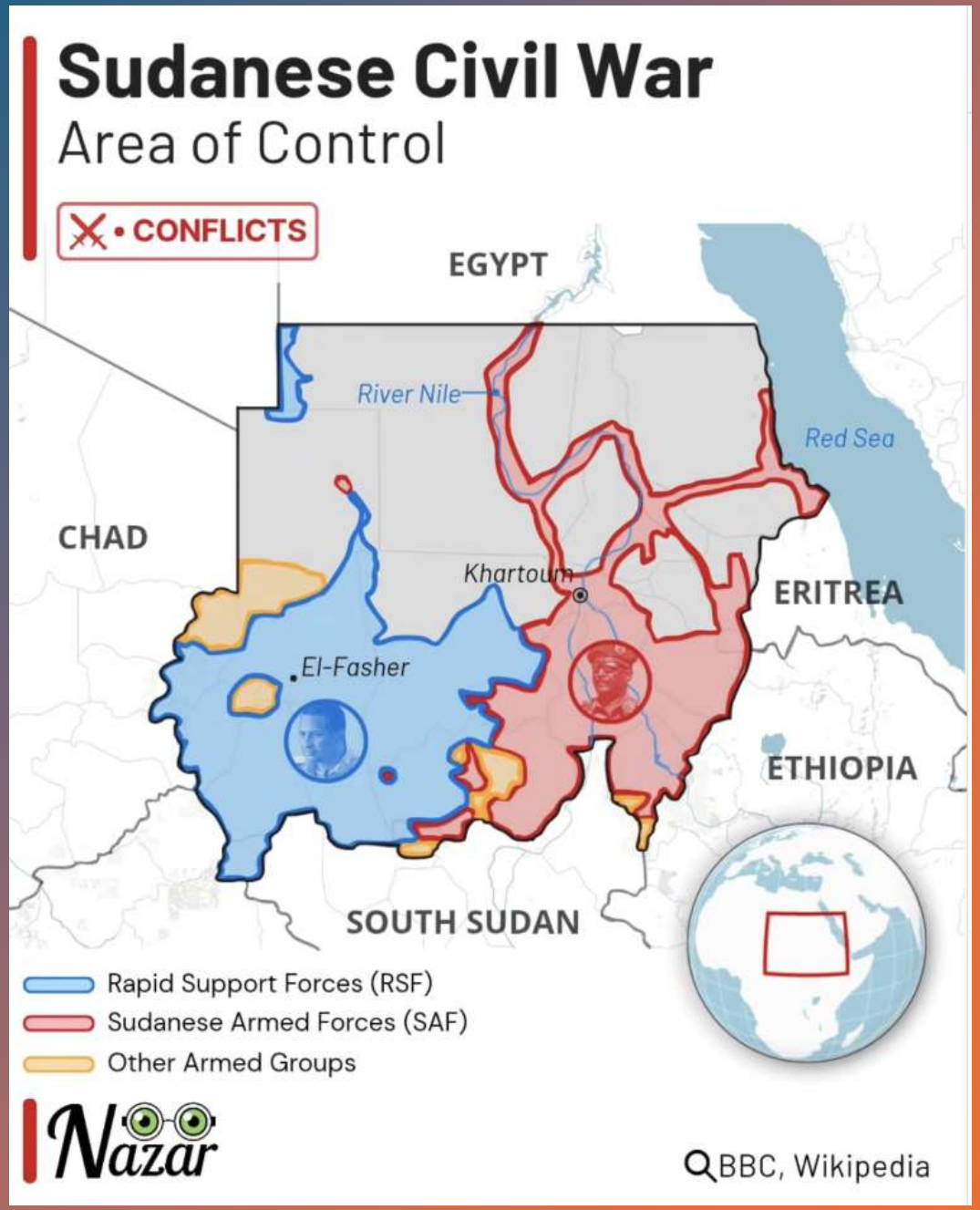

Pecahnya internal Sudan

- Hingga 2025, Sudan memiliki dua pemerintahan saingan — **Pemerintah Harapan (Hope Government**) yang dikendalikan SAF di Port Sudan (timur) dan **Pemerintah Perdamaian dan Persatuan (Government of Peace and Unity)** bentukan RSF di Nyala, Darfur (barat).
- Keduanya secara nominal disebut pemerintahan sipil, tetapi pada kenyataannya tetap dikendalikan oleh

- Setelah kudeta, ketegangan antara SAF dan RSF meningkat, terutama terkait **penguasaan sektor emas Sudan.**
- Uni Emirat Arab (UEA) menjadi tujuan utama penyelundupan emas oleh milisi, yang kemudian dijual ke pasar global. Sebagai imbalannya, UEA memasok senjata kepada RSF melalui jalur Chad

Kenapa UEA terlibat di Sudan?

- UEA bergantung ke emas Sudan sebagai deiversifikasi ekonomi. Diperkirakan 90% produksi emas Sudan, yang berjumlah sekitar USD 13,4 miliar (Rp225 T)dalam perdagangan gelap, diselundupkan ke UEA.
- Sudan menjadi lumpung pangan bagi UEA yang mengimpor 90% kebutuhan pangannya akibat keterbatasan lahan pertanian dan kelangkaan air.
- Langkah untuk kuasai pelabuhan strategis di Laut Merah demi ambisi maritim UEA. Sekitar sepertiga dari lalu lintas kontainer global melewati wilayah ini.
- Dominasi di infrastruktur Keuangan Sudan. Selama periode sanksi AS, Bank Islam Faisal Sudan dan Bank Islam Abu Dhabi praktis merupakan satu-satunya lembaga yang memfasilitasi transfer keuangan ke dan dari Sudan.
- Perang proksi Teluk. Meskipun sekutu secara politik, Saudi dan UEA mulai bersaing dalam hal bisnis dan investasi di kawasan. Saudi membuat kebijakan yang mewajibkan perusahaan multinasional yang beroperasi di Timur Tengah untuk mendirikan kantor pusat regional di Saudi, bukan di Dubai.
- (Mohammad Khansa, 2025)

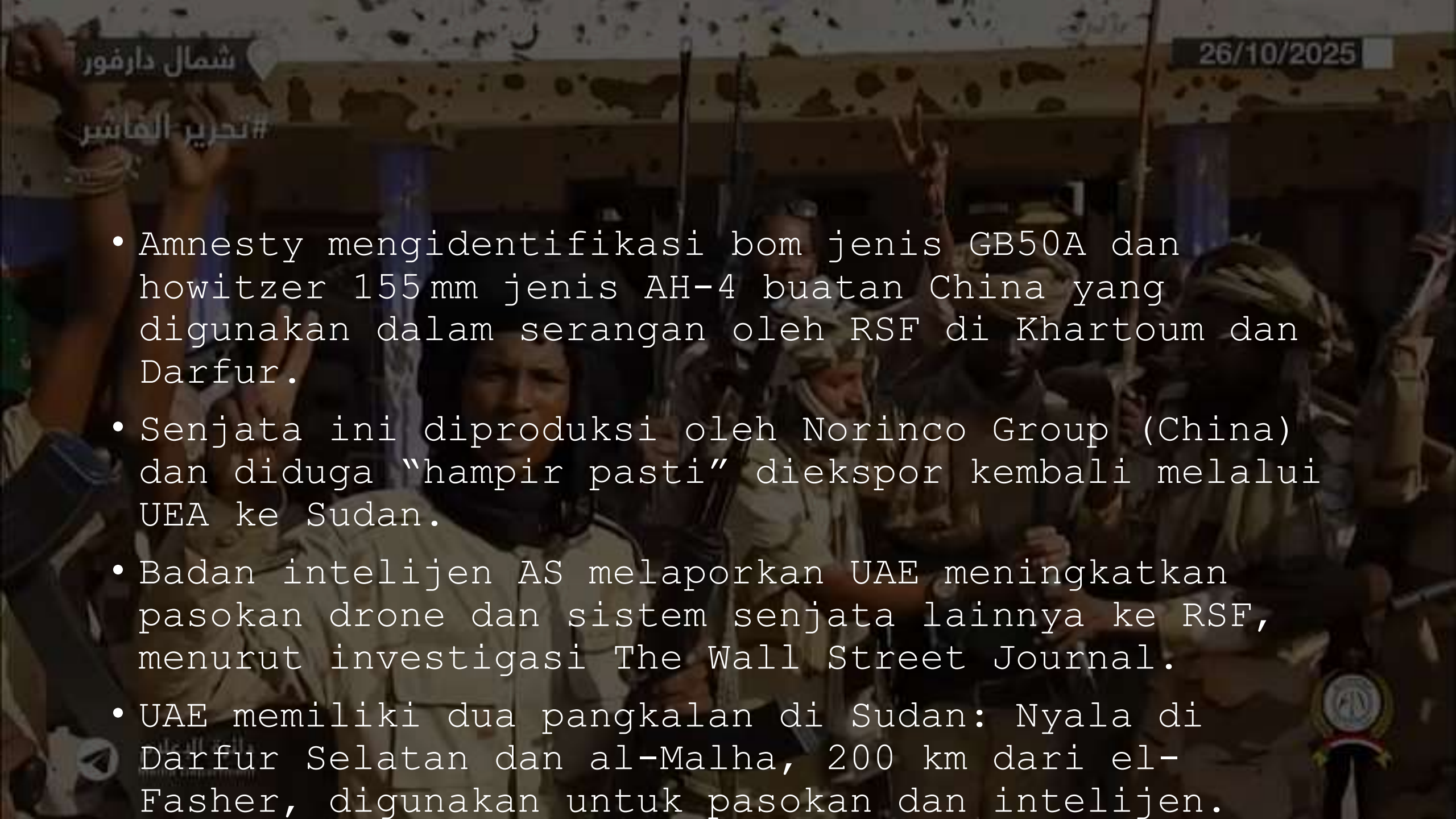

- Amnesty mengidentifikasi bom jenis GB50A dan howitzer 155mm jenis AH-4 buatan China yang digunakan dalam serangan oleh RSF di Khartoum dan Darfur.
- Senjata ini diproduksi oleh Norinco Group (China) dan diduga “hampir pasti” diekspor kembali melalui UEA ke Sudan.
- Badan intelijen AS melaporkan UAE meningkatkan pasokan drone dan sistem senjata lainnya ke RSF, menurut investigasi The Wall Street Journal.
- UAE memiliki dua pangkalan di Sudan: Nyala di Darfur Selatan dan al-Malha, 200 km dari el-Fasher, digunakan untuk pasokan dan intelijen.

Upaya Menyeret UEA ke Pengadilan Internasional

- Sudan membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional (ICJ) dengan tuduhan bahwa UAE ikut terlibat dalam genosida. Namun, pada Mei 2025, pengadilan membatalkan kasus itu. Alasannya: ICJ tidak punya wewenang untuk memutus kasus ini, karena UAE sebelumnya sudah memilih untuk tidak ikut campur dalam penyelesaian kasus genosida

Upaya mediasi

Pada 12 September 2025, kelompok Quad (AS, Mesir, UEA, Saudi) mengumumkan peta jalan bersama untuk mengakhiri perang Sudan. Isi utamanya meliputi:

1.Gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan.

2. Menuju gencatan senjata permanen,

3. Proses transisi sembilan bulan menuju pemerintahan sipil.

Kenapa mediasi masih gagal?

1. Penolakan SAF terhadap rencana Quad. Menegaskan bahwa pemerintah Port Sudan adalah satu-satunya yang sah. Menolak berunding sebelum legitimasi itu diakui.

2. RSF menolak gencatan senjata. Mereka sedang bersiap menaklukkan kota El-Fasher, yang akhirnya benar-benar jatuh ke tangan RSF

3. Tidak memiliki mekanisme penegakan atau sanksi. Tidak ada tekanan nyata terhadap aktor eksternal seperti UEA yang tetap memasok senjata kepada RSF. Maka, tanpa embargo senjata internasional, konflik terus berlanjut.

4. Fokus mediasi hanya pada penghentian pertempuran sementara, bukan akar konflik. Akar masalah: (a) Sistem militeristik yang mengakar dalam politik Sudan. (b) Perebutan sumber daya di antara elit bersenjata.

Apa yang diperlukan rakyat Sudan saat ini?

1. Makanan dan kebutuhan pokok. Lebih dari 24 juta orang menghadapi kelaparan akut atau kekurangan makanan serius di beberapa daerah.
2. Air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar. Banyak fasilitas kesehatan rusak atau tidak berfungsi, sehingga penyakit seperti kolera dan malaria menyebar luas.
3. Tempat aman dan perlindungan bagi pengungsi. Konflik membuat jutaan orang terpaksa mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri
4. Akses bantuan kemanusiaan. Banyak daerah yang sedang perang atau sulit dijangkau, sehingga bantuan sulit masuk.
5. Solusi politik dan keamanan jangka panjang. Selain kebutuhan sehari-hari yang sangat mendesak, rakyat juga butuh agar perang segera berhenti, dan agar pemerintah bisa kembali menjalankan layanan publik dengan baik.